

Pengaruh SIPD dan E-Procurement Terhadap Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Good Governance sebagai Variabel Mediasi: Studi Pada Pemerintah Kota Jambi

Nadiah Isnaini^{1*}, Yulisuman², Nela Safelia³

Program Studi Akuntansi, Universitas Jambi, Indonesia

*Corresponding Author: nnadiahisnaini12@email.com

Article History:

Received 2025-10-07

Accepted 2025-12-02

Keywords:

SIPD

E-Procurement

Good Governance

Performance Accountability System

ABSTRACT

The research to examine the influence of the Regional Government Information System (SIPD) and E-procurement on the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP), with Good Governance serving as a mediating variable. The study was conducted as a case study within the Jambi City Government. A quantitative approach utilizing the survey method was applied, with data gathered through questionnaires distributed to 100 government officials, yielding 92 valid responses. The collected data were analyzed using the Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) technique. The findings reveal that SIPD and E-Procurement both have a significant positive effect on SAKIP. Moreover, SIPD and E-Procurement also positively affect Good Governance, and Good Governance significantly influences SAKIP. However, Good Governance does not mediate the relationship between SIPD and SAKIP, but it does mediate the relationship between E-Procurement and SAKIP. These results emphasize the importance of strengthening good governance practices so that the use of digital information systems, particularly SIPD and E-Procurement, can optimally enhance transparency, accountability, and institutional performance.

Kata Kunci:

SIPD

E-Procurement

Good Governance

Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan E-Procurement terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan Good Governance sebagai variabel mediasi, menggunakan studi kasus pada Pemerintah Kota Jambi. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 aparatur pemerintah, dan 92 di antaranya memenuhi kriteria untuk dianalisis. Analisis data dilakukan menggunakan teknik Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa SIPD dan E-Procurement memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap SAKIP. Selain itu, kedua variabel tersebut juga berpengaruh positif terhadap Good Governance, sementara Good Governance terbukti berpengaruh signifikan terhadap SAKIP. Namun, Good Governance tidak berperan sebagai mediator dalam hubungan antara SIPD dan SAKIP, melainkan memediasi hubungan antara E-Procurement dan SAKIP. Temuan ini menekankan pentingnya penguatan prinsip good governance agar pemanfaatan sistem digital, khususnya SIPD dan E-Procurement, dapat secara maksimal mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta kinerja instansi pemerintah.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mendorong pemerintah untuk melakukan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan guna mewujudkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Reformasi birokrasi menuntut penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) melalui inovasi seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan *e-procurement*, yang menjadi instrumen utama dalam penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

SIPD merupakan sistem terintegrasi yang digunakan untuk mengelola data perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan pembangunan daerah. Berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019, SIPD mendukung tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel dengan menyediakan informasi berbasis data real-time. Melalui SIPD, pemerintah daerah dapat menata keuangan, memantau kinerja, dan menyusun laporan akuntabilitas secara digital, sehingga meminimalkan risiko penyimpangan serta memperkuat pengawasan publik.

Sementara itu, *e-procurement* merupakan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang bertujuan meningkatkan transparansi, efektivitas, dan efisiensi pengeluaran anggaran. Implementasinya, sebagaimana diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018, memungkinkan proses pengadaan dilakukan secara terbuka dan kompetitif, sehingga mengurangi potensi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sinergi antara SIPD dan e-procurement menciptakan ekosistem tata kelola keuangan publik yang terpadu, di mana perencanaan dan pengalokasian anggaran melalui SIPD terhubung dengan proses pelaksanaan melalui e-procurement, menghasilkan sistem pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel.

Meskipun kedua sistem tersebut telah diterapkan di berbagai daerah, termasuk di Kota Jambi, tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah belum menunjukkan hasil optimal. Data LAKIP Provinsi Jambi tahun 2020–2023 memperlihatkan fluktuasi capaian akuntabilitas yang cenderung stagnan, meskipun Kota Jambi mencatat peningkatan signifikan pada 2023. Fenomena ini menunjukkan adanya perbaikan sistemik, namun juga mengindikasikan bahwa implementasi teknologi informasi belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan prinsip good governance.

Good governance berperan sebagai variabel mediasi penting dalam hubungan antara SIPD, e-procurement, dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Prinsip-prinsip utamanya—transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi—menjadi dasar agar penerapan teknologi informasi tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga substantif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

1. Transparansi dari SIPD dan e-procurement membuka akses publik terhadap data keuangan dan pengadaan barang/jasa.
2. Akuntabilitas diperkuat melalui penyediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara real-time.
3. Partisipasi masyarakat meningkat karena adanya keterbukaan informasi yang mendorong pengawasan publik.
4. Efisiensi tercapai melalui optimalisasi sumber daya dan pemangkasan birokrasi manual.

Melalui pendekatan tersebut, SIPD dan e-procurement tidak hanya menjadi alat digital, tetapi juga instrumen transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang lebih transparan dan responsif. Keberhasilan penerapannya bergantung pada sinergi sistem informasi, kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan prinsip good governance secara konsisten.

Beberapa penelitian sebelumnya memperkuat argumentasi ini. Amri (2022) dan Andhayani & Eltivia (2022) menemukan bahwa implementasi SIPD berpengaruh positif terhadap transparansi dan kualitas laporan keuangan daerah. Hadinata (2022) dan Rifqa (2020) menunjukkan bahwa e-procurement

meningkatkan efisiensi dan kepuasan publik. Namun, penelitian Apriliani (2022) menegaskan bahwa digitalisasi belum otomatis meningkatkan akuntabilitas tanpa didukung tata kelola yang baik. Sementara Wospakrik et al. (2025) dan Sakti et al. (2023) membuktikan bahwa *good governance* berperan sebagai penghubung antara sistem informasi dan peningkatan kinerja organisasi.

Dalam konteks ini, penelitian di Kota Jambi menjadi relevan karena menunjukkan bagaimana penerapan SIPD dan e-procurement yang terintegrasi, bila dimediasi oleh penerapan prinsip good governance, dapat meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi pemerintahan tidak hanya bergantung pada aspek teknologi, tetapi juga pada penguatan tata kelola yang berintegritas, partisipatif, dan transparan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menguji pengaruh *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah* (SIPD) dan *E-Procurement* terhadap *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (SAKIP) melalui *Good Governance* sebagai variabel mediasi. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu mengukur hubungan antarvariabel melalui data numerik yang diolah secara statistik (Arifin, 2018; Sekaran & Bougie, 2017).

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan terdiri atas:

1. Data primer, diperoleh langsung melalui penyebaran kuesioner tertutup kepada responden.
2. Data sekunder, bersumber dari dokumen resmi, literatur ilmiah, serta publikasi pemerintah yang relevan.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian mencakup seluruh pegawai yang terlibat dalam implementasi SIPD, e-procurement, dan pelaksanaan SAKIP pada Pemerintah Kota Jambi, antara lain kepala OPD, kasubbag keuangan dan perencanaan, bendahara, serta PPTK.

Pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria responden yang memahami proses perencanaan, keuangan, dan pengadaan barang/jasa. Jumlah sampel ditetapkan sebanyak 100 responden yang berasal dari 25 OPD di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert lima poin (1 = sangat tidak setuju hingga 5 = sangat setuju). Skala ini digunakan untuk menilai persepsi responden terhadap setiap pernyataan terkait variabel penelitian.

Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini melibatkan tiga jenis variabel, yaitu:

1. Variabel bebas (eksogen):
 - o *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah* (SIPD)
 - o *E-Procurement*
2. Variabel mediasi: *Good Governance*
3. Variabel terikat (endogen): *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (SAKIP)

Setiap variabel diukur melalui beberapa indikator yang disusun berdasarkan teori dan regulasi terkait (Permendagri No. 70 Tahun 2019; Mardiasmo, 2002; Sakti et al., 2023).

Analisis Data

Data dianalisis menggunakan *Structural Equation Modeling–Partial Least Square* (SEM-PLS) melalui aplikasi SmartPLS. Analisis dilakukan dalam dua tahap:

1. Outer Model (Model Pengukuran) untuk menguji validitas dan reliabilitas indikator melalui *loading factor*, *Average Variance Extracted (AVE)*, dan *Composite Reliability*.
2. Inner Model (Model Struktural) untuk menguji hubungan antarvariabel laten dengan melihat nilai *R-Square*, *Q-Square*, serta signifikansi jalur (*path coefficient*).

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan persepsi responden terhadap setiap variabel. Penilaian menggunakan interval skor 100–500 dengan kategori:

- 100–180 = Buruk
- 181–260 = Kurang Baik
- 261–340 = Cukup Baik
- 341–420 = Baik
- 421–500 = Sangat Baik

Pengujian Hipotesis

Pengujian dilakukan dengan metode bootstrapping pada SEM-PLS. Hubungan antarvariabel dianggap signifikan apabila nilai *p-value* < 0,05. Hasil analisis ini digunakan untuk menentukan pengaruh langsung dan tidak langsung antarvariabel, serta menguji peran mediasi *Good Governance*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Outer Model

Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan menggunakan software SmartPLS 4.1.1.4 dengan total 92 responden berasal dari 25 OPD Pemerintah Kota Jambi. Pengujian terhadap indikator-indikator pada masing-masing variabel menggunakan pendekatan Validitas konvergen yang berupa pengujian terhadap Nilai Loading factor dan Average Variance Extracted (AVE). Sedangkan pendekatan Validitas diskriminan menguji cross loading, latent variable correlation, dan fornell-larcker.

Validitas konvergen

Pengujian Terpenuhiitas konvergen dilakukan dengan mengevaluasi nilai outer loading. Suatu indikator dianggap memiliki konvergen Terpenuhi itu yang baik apabila nilai outer loading lebih besar dari 0,60.

Tabel 1. Validitas konvergen

Kode item	Outer loading	Kriteria	Keterangan
X1.1	0.721	0,60	Terpenuhi
X1.2	0.746	0,60	Terpenuhi
X1.3	0.776	0,60	Terpenuhi
X1.4	0.762	0,60	Terpenuhi
X1.5	0.765	0,60	Terpenuhi
X1.6	0.813	0,60	Terpenuhi
X1.7	0.677	0,60	Terpenuhi
X1.8	0.694	0,60	Terpenuhi
X1.10	0.746	0,60	Terpenuhi
X1.11	0.696	0,60	Terpenuhi
X1.12	0.666	0,60	Terpenuhi
X2.1	0.767	0,60	Terpenuhi
X2.2	0.907	0,60	Terpenuhi
X2.3	0.868	0,60	Terpenuhi
X2.4	0.848	0,60	Terpenuhi

X2.5	0.795	0,60	Terpenuhi
X2.6	0.759	0,60	Terpenuhi
Y1	0.893	0,60	Terpenuhi
Y2	0.841	0,60	Terpenuhi
Y3	0.901	0,60	Terpenuhi
Y4	0.757	0,60	Terpenuhi
Y5	0.724	0,60	Terpenuhi
Z1	0.715	0,60	Terpenuhi
Z2	0.741	0,60	Terpenuhi
Z3	0.836	0,60	Terpenuhi
Z4	0.841	0,60	Terpenuhi
Z5	0.795	0,60	Terpenuhi
Z6	0.774	0,60	Terpenuhi
Z7	0.765	0,60	Terpenuhi
Z8	0.829	0,60	Terpenuhi
Z9	0.765	0,60	Terpenuhi
Z10	0.829	0,60	Terpenuhi

Sumber : Data diolah menggunakan SmartPLS, 2025

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa seluruh outer loading setiap indikator pengukuran SIPD (X1), E-Procurement (X2), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) dan Good Governance (Z) berada diatas 0,60, sehingga dapat disimpulkan seluruh indikator tersebut memenuhi kriteria validitas konvergen.

Average Variance Extracted (AVE)

Hasil estimasi Average Variance Extracted (AVE) disajikan pada tabel , variabel dianggap valid apabila nilai AVE-nya lebih besar dari 0,5

Tabel 2. Hasil AVE

<i>Average variance extracted (AVE)</i>		<i>keterangan</i>
EPRO	0.660	Terpenuhi
GG	0.620	Terpenuhi
SAKIP	0.694	Terpenuhi
SIPD	0.535	Terpenuhi

Sumber : Data diolah menggunakan SmartPLS, 2025

Hasil pengujian validitas konstruk melalui nilai Average Variance Extracted (AVE) menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian telah memenuhi kriteria yang ditetapkan

Validitas Diskriminan

Discriminant validity bertujuan untuk memastikan bahwa setiap konstruk dalam model pengukuran benar-benar mengukur hal yang berbeda dan tidak saling tumpang tindih. Dengan kata lain, discriminant validity menilai sejauh mana konstruk yang berbeda dapat dibedakan satu sama lain. Pengukuran discriminant validity dapat dilakukan melalui tiga kriteria utama, yaitu cross loading, korelasi variabel laten, dan Fornell-Larcker.

Cross loading

Sebuah indikator dianggap valid jika nilai loading-nya terhadap konstruk yang diukur lebih tinggi dibandingkan dengan nilai loading terhadap konstruk lainnya. Dengan demikian, analisis cross loading digunakan untuk memastikan bahwa setiap indikator secara akurat merefleksikan konstruk yang

seharusnya diukur. Hasil pengolahan data menggunakan SmartPLS versi 4.1.1.4 untuk analisis cross loading disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Cross Loading

	SIPD	E-Pro	SAKIP	GG	Keterangan
X1.1	0.719	0.492	0.445	0.357	Valid
X1.2	0.743	0.506	0.556	0.418	Valid
X1.3	0.775	0.588	0.560	0.412	Valid
X1.4	0.759	0.601	0.589	0.455	Valid
X1.5	0.764	0.516	0.485	0.387	Valid
X1.6	0.812	0.554	0.505	0.502	Valid
X1.7	0.681	0.556	0.485	0.512	Valid
X1.8	0.697	0.426	0.457	0.510	Valid
X1.10	0.636	0.566	0.430	0.535	Valid
X1.11	0.746	0.450	0.451	0.604	Valid
X1.12	0.698	0.464	0.427	0.547	Valid
X2.1	0.629	0.664	0.551	0.490	Valid
X2.2	0.659	0.765	0.546	0.536	Valid
X2.3	0.617	0.908	0.504	0.656	Valid
X2.4	0.579	0.869	0.531	0.652	Valid
X2.5	0.548	0.850	0.557	0.645	Valid
X2.6	0.456	0.795	0.587	0.609	Valid
Y1	0.547	0.466	0.758	0.432	Valid
Y2	0.594	0.514	0.893	0.495	Valid
Y3	0.546	0.626	0.841	0.617	Valid
Y4	0.554	0.577	0.902	0.603	Valid
Y5	0.558	0.596	0.758	0.584	Valid
Z1	0.496	0.495	0.400	0.728	Valid
Z2	0.587	0.577	0.532	0.844	Valid
Z3	0.391	0.482	0.427	0.748	Valid
Z4	0.347	0.492	0.476	0.761	Valid
Z6	0.623	0.650	0.583	0.811	Valid
Z7	0.578	0.635	0.560	0.768	Valid
Z8	0.566	0.590	0.545	0.789	Valid
Z9	0.451	0.611	0.457	0.792	Valid
Z10	0.543	0.655	0.644	0.831	Valid

Sumber : Data diolah menggunakan SmartPLS, 2025

Hasil uji cross loading menunjukkan pada validitas diskriminan masing-masing konstruk. Seluruh indikator yang tersisa telah memiliki nilai loading yang lebih tinggi pada konstraknya dibandingkan dengan konstruk lain.

Latent Variabel Correlation

Latent variable correlation adalah bagian dari langkah-langkah untuk memeriksa discriminant validity, melihat seberapa besar hubungan antar konstruk dalam model. Korelasi yang tinggi antar konstruk dapat menunjukkan masalah diskriminasi validitas dan multikolinearitas. Output hasil estimasi pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil LVC

	E-Pro	GG	SAKIP	SIPD	√AVE	Ket
E-Pro	1.000	0.740	0.672	0.712	0.812	valid
GG	0.740	1.000	0.662	0.657	0.787	valid
SAKIP	0.672	0.662	1.000	0.673	0.833	valid
SIPD	0.712	0.657	0.673	1.000	0.732	valid

Sumber : Data diolah menggunakan SmartPLS, 2025

Hasil uji validitas diskriminan dengan menggunakan kriteria Fornell-Larcker menunjukkan bahwa seluruh konstruk penelitian telah memenuhi syarat validitas. Hal ini terlihat dari nilai akar kuadrat Average Variance Extracted (√AVE) pada setiap konstruk yang lebih besar dibandingkan dengan korelasi antar konstruk lainnya.

Fornell-Larcker

Uji validitas diskriminan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan kriteria Fornell-Larcker Criterion. Menurut Fornell dan Larcker (1981) dan Ghazali (2018), validitas diskriminan dapat dinilai dengan cara membandingkan nilai akar kuadrat dari Average Variance Extracted (AVE) dengan korelasi antar konstruk laten. Suatu konstruk dinyatakan memiliki validitas diskriminan yang baik apabila nilai akar kuadrat AVE lebih besar daripada nilai korelasi konstruk tersebut dengan konstruk lainnya. Dengan demikian, Fornell-Larcker criterion digunakan untuk memastikan bahwa setiap variabel laten dalam model penelitian beber-benar berbeda (distinct) dari variabel laten lainnya. Berikut fornell-larcker disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. Hasil Fornell-Larcker

	E-Pro	GG	SAKIP	SIPD
E-Pro	0.812			
GG	0.740	0.787		
SAKIP	0.672	0.662	0.833	
SIPD	0.712	0.657	0.673	0.732

Sumber : Data diolah menggunakan SmartPLS, 2025

Berdasarkan hasil uji validitas diskriminan menggunakan kriteria Fornell-Larcker, diperoleh nilai akar kuadrat AVE (Average Variance Extracted) yang ditampilkan pada diagonal tabel. Nilai √AVE pada masing-masing konstruk lebih besar dibandingkan dengan korelasi antar konstruk lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel laten dalam penelitian ini memiliki validitas diskriminan yang baik.

Construct reliability

Cronbach's Alpha

Cronbach's alpha salah satu indikator utama untuk menilai reliabilitas variabel dalam model PLS-SEM. Nilai Cronbach's alpha yang tinggi menunjukkan bahwa konstruk atau variabel diukur secara konsisten dan dapat dipercaya untuk validitas pengukuran dalam analisis PLS. Sebaliknya, nilai Cronbach's alpha yang rendah menandakan bahwa indikator atau pernyataan yang digunakan kurang reliabel dan mungkin perlu diperbaiki atau diganti.

Tabel 6. Hasil Construct reliability

	Cronbach's alpha	Keterangan
E-Procurement	0.894	Reliabel
Good governance	0.923	Reliabel

SAKIP	0.888	Reliabel
SIPD	0.912	Reliabel

Sumber : Data diolah menggunakan SmartPLS, 2025

Berdasarkan tabel di atas, seluruh variabel dalam model memiliki nilai *cronbach's Alpha* di atas ambang batas minimum 0,70, yang menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan bersifat reliabel atau konsisten dalam mengukur konstruksinya

Composite reliability

Uji reliabilitas tidak hanya dilakukan dengan menggunakan nilai Cronbach's Alpha, tetapi juga dengan melihat nilai *Composite Reliability* (CR). Menurut Ghazali (2018), konstruk dinyatakan reliabel apabila nilai CR lebih besar dari 0,70. Penggunaan CR dianggap lebih baik dibandingkan Cronbach's Alpha karena dalam perhitungannya tidak mengasumsikan bahwa semua indikator memiliki bobot yang sama, sehingga memberikan estimasi reliabilitas yang lebih akurat. Dengan demikian, uji CR digunakan untuk memastikan konsistensi internal indikator dalam mengukur konstruk laten yang diteliti.

Tabel 7. Hasil Cronbach's Alpha

	Composite reliability (rho_c)	Keterangan
E-Procurement	0.920	Reliabel
Good Governance	0.936	Reliabel
SAKIP	0.918	Reliabel
SIPD	0.927	Reliabel

Sumber : Data diolah menggunakan SmartPLS, 2025

Berdasarkan Tabel seluruh variabel dalam model memiliki nilai composite reliability di atas ambang batas minimum 0,70, sehingga dinyatakan reliabel. Nilai ini menunjukkan bahwa indikator-indikator pada masing-masing konstruk/variabel memiliki konsistensi yang sangat baik dalam mengukur variable.

Inner Model

R-Square

Pengujian selanjutnya adalah melihat nilai R-Square (R^2) untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dalam model penelitian. Menurut Ghazali (2018), nilai R-Square sebesar 0,75 dikategorikan kuat, 0,50 dikategorikan moderat, dan 0,25 dikategorikan lemah. Dengan demikian, semakin tinggi nilai R-Square menunjukkan semakin baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Uji R-Square ini digunakan untuk menilai goodness of fit pada model struktural serta menunjukkan kekuatan prediktif dari model penelitian.

Tabel 8. Hasil R-Square

	R-square	R-square adjusted
GG	0.582	0.573
SAKIP	0.559	0.544

Sumber : Data diolah menggunakan SmartPLS, 2025

Hasil uji R Square (R^2) menunjukkan besarnya proporsi varians pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya dalam model.

Effect size (f^2)

Effect size (f^2) digunakan untuk menilai besarnya pengaruh spesifik variabel independen terhadap variabel dependen dalam model. Pengukuran dilakukan dengan melihat perubahan nilai R^2 setelah variabel independen tertentu dihapus dari model. Interpretasi nilai f^2 adalah sebagai berikut: $f^2 < 0,02$ (sangat kecil), $0,02 \leq f^2 < 0,15$ (efek kecil), $0,15 \leq f^2 < 0,35$ (efek sedang), dan $f^2 \geq 0,35$ (efek besar). Dengan menggunakan nilai f^2 , peneliti dapat menilai kekuatan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, serta memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan antar variabel laten.

Tabel 9. Hasil Effect size

	E-Pro	GG	SAKIP	SIPD
E-Pro		0.360	0.048	
GG			0.070	
SAKIP				
SIPD		0.082	0.107	

Sumber : Data diolah menggunakan SmartPLS, 2025

Pengujian Hipotesis

Uji signifikansi hubungan dalam PLS-SEM bertujuan untuk menilai apakah hubungan antar variabel laten dalam model bersifat signifikan secara statistik. Proses ini dilakukan menggunakan teknik bootstrapping, di mana data di-resampling untuk menghitung koefisien jalur (path coefficient) beserta standar error-nya. Hasil pengujian disajikan dalam bentuk t-statistik atau p-value. Suatu hubungan dianggap signifikan jika p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan (pada penelitian ini menggunakan 0,05). Koefisien jalur yang signifikan menunjukkan adanya dukungan statistik yang kuat antara variabel independen dan dependen laten, sehingga hipotesis penelitian dapat diterima. Berikut disajikan hasil bootstrapping untuk efek langsung (*direct effect*) dan efek tidak langsung (*indirect effect*) pada model penelitian.

Tabel 10. Hasil Uji Hipotesis

	Original sample (O)	T statistics (O/STDEV)	P values	Keterangan
SIPD -> SAKIP	0.322	2.437	0.007	Signifikan
E-Pro -> SAKIP	0.242	1.666	0.048	Signifikan
SIPD -> GG	0.263	2.359	0.009	Signifikan
E-Pro -> GG	0.553	4.883	0.000	Signifikan
GG -> SAKIP	0.272	2.050	0.020	Signifikan
SIPD -> GG -> SAKIP	0.072	1.347	0.089	Tidak Signifikan
E-Pro -> GG -> SAKIP	0.150	2.040	0.021	Signifikan

Sumber : Data diolah menggunakan SmartPLS, 2025

Pembahasan**1. Pengaruh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD berpengaruh signifikan terhadap SAKIP dengan nilai koefisien jalur 0,322 dan p-value 0,002. Artinya, penerapan SIPD mampu meningkatkan transparansi, akurasi data, serta efektivitas pelaporan kinerja pemerintah daerah. Implementasi SIPD di Pemerintah Kota

Jambi telah berjalan baik, terlihat dari dukungan kepala daerah dan kegiatan peningkatan kapasitas SDM melalui Bimtek SIPD-RI. Secara teori, hasil ini sejalan dengan teori keagenan dan Technology Acceptance Model (TAM) yang menjelaskan bahwa sistem informasi yang bermanfaat dan mudah digunakan dapat meningkatkan akuntabilitas publik. Dengan demikian, SIPD menjadi instrumen penting dalam memperkuat pengawasan, transparansi, dan efisiensi kinerja pemerintahan daerah.

2. Pengaruh E-Procurement terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

E-Procurement juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap SAKIP dengan nilai koefisien jalur 0,242 dan p-value 0,048. Implementasi sistem ini meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Jambi. Hal ini dibuktikan dengan nilai Indeks SPBE "Sangat Baik" dan nilai SAKIP "BB". Secara teoretis, sesuai dengan teori keagenan, E-Procurement menjadi mekanisme pengawasan digital yang mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran. Meski demikian, efektivitasnya terhadap peningkatan akuntabilitas belum maksimal karena keterbatasan integrasi antara sistem pengadaan dan pelaporan kinerja. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan hasil serupa, bahwa E-Procurement mendukung akuntabilitas namun perlu didukung SDM dan infrastruktur yang memadai.

3. Pengaruh SIPD terhadap Good Governance

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa SIPD berpengaruh signifikan terhadap good governance dengan nilai koefisien jalur 0,231 dan p-value 0,012. SIPD mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola pemerintahan melalui pengelolaan data dan keuangan daerah secara terintegrasi. Hal ini sejalan dengan teori keagenan dan TAM, yang menekankan bahwa sistem informasi yang bermanfaat memperkuat praktik tata kelola pemerintahan yang baik. Secara kontekstual, Pemerintah Kota Jambi telah mengoptimalkan SIPD untuk keterbukaan data dan koordinasi antarunit kerja, yang memperkuat prinsip transparansi dan partisipasi publik. Dengan demikian, SIPD tidak hanya alat administratif, tetapi juga fondasi utama dalam mewujudkan good governance.

4. Pengaruh E-Procurement terhadap Good Governance

E-Procurement memiliki pengaruh signifikan terhadap good governance dengan nilai koefisien jalur 0,597 dan p-value 0,000. Artinya, semakin baik penerapan E-Procurement, semakin kuat implementasi prinsip-prinsip good governance. Sistem ini meningkatkan transparansi dan efisiensi proses pengadaan serta meminimalkan potensi korupsi. Penelitian ini mendukung pandangan bahwa digitalisasi pengadaan publik merupakan strategi efektif untuk mewujudkan tata kelola yang bersih dan akuntabel. Di Kota Jambi, sistem pengadaan daring memungkinkan masyarakat memantau proses lelang secara langsung, sehingga memperkuat kepercayaan publik dan akuntabilitas pemerintahan.

5. Pengaruh Good Governance terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Good governance terbukti berpengaruh signifikan terhadap SAKIP dengan koefisien jalur 0,342 dan p-value 0,003. Semakin baik penerapan prinsip-prinsip good governance, semakin efektif pula pelaksanaan SAKIP. Pemerintah Kota Jambi telah menunjukkan kinerja yang baik dalam evaluasi dan pelaporan program kerja. Secara teoretis, hubungan ini mendukung governance theory dan public accountability theory, di mana prinsip transparansi, partisipasi, dan rule of law menjadi dasar terbentuknya sistem akuntabilitas yang kuat. Penelitian sebelumnya juga memperkuat temuan ini bahwa implementasi good governance berperan langsung dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

6. Pengaruh SIPD terhadap SAKIP dengan Good Governance sebagai Variabel Mediasi

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa good governance tidak memediasi secara signifikan hubungan antara SIPD dan SAKIP (p-value 0,058). Meskipun SIPD dan good governance masing-masing berpengaruh signifikan terhadap SAKIP, hubungan tidak langsungnya belum terbukti kuat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas kinerja lebih banyak dipengaruhi oleh aspek teknis penggunaan SIPD daripada melalui perantara tata kelola. Faktor penyebabnya dapat meliputi keterbatasan SDM, infrastruktur, serta adaptasi birokrasi terhadap sistem digital. Temuan ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan dengan mempertimbangkan variabel mediasi lain seperti komitmen organisasi, kapabilitas teknologi, atau budaya kerja birokrasi.

7. Pengaruh E-Procurement terhadap SAKIP dengan Good Governance sebagai Variabel Mediasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa *Good Governance* berhasil memediasi hubungan antara E-Procurement dan SAKIP dengan nilai koefisien 0,204, t-statistik 2,716 ($>1,96$), dan p-value 0,003 ($<0,05$). Hal ini menandakan bahwa meskipun pengaruh langsung E-Procurement terhadap SAKIP tidak signifikan, melalui *Good Governance* pengaruhnya menjadi positif dan signifikan. Artinya, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam sistem pengadaan elektronik mampu memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sholeh et al. (2023), Munawaroh & Wulandari (2023), dan Nugroho & Suryani (2020) yang menyatakan bahwa *Good Governance* merupakan penghubung penting antara implementasi E-Procurement dan peningkatan kinerja akuntabilitas.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa SIPD dan E-Procurement berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan daerah. SIPD mendukung perencanaan dan pelaporan kinerja yang transparan, sedangkan E-Procurement memperkuat efisiensi dan pengawasan dalam pengadaan barang/jasa. Keduanya berkontribusi terhadap penerapan prinsip good governance, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Namun, peran mediasi good governance belum terbukti kuat, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat integrasi sistem informasi dengan praktik tata kelola pemerintahan yang baik.

REFERENSI

- Apriliani, A. S., Dirgantari, N., Hariyanto, E., & Wibowo, H. (2022). Pengaruh E-Planning, E-Budgeting, dan E-Procurement Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. *Owner*, 7(1), 254–264. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1289>
- Azmy, N. (2021). *Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (E Procurement) di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar*.
- Bappeda Kota Jambi. (2023). *Bimbingan Teknis SIPD-RI Kemendagri Kota Jambi* [Berita]. <https://bappeda.jambikota.go.id/berita/detail/bimtek-sipd-ri-kemendagri-kota-jambi>
- Desrita, R. (2021). *Implementasi Sistem E-planning Pada Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti*. <https://repository.uir.ac.id/11643/%0Ahttps://repository.uir.ac.id/11643/1/177122050.pdf>
- Hadinata, A. P. (2022). *Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-procurement) Berbasis Amanah Dalam Meningkatkan Akuntabilitas (Studi Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar)*. 9, 356–363.

- Hadianto, A. W. (2022). Dampak Penggunaan E-procurement, Akuntabilitas, Kompetensi dan Kompensasi pada Kinerja Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. *Prosiding Seminar Nasional Unimus*, 5, 267–278.
- Padmasari, O. A. (2024). *Pengaruh implementasi e-planning, e-budgeting, dan e-procurement terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kabupaten lampung utara*. 01031182025020.
- Pemerintah Kota Jambi. (2025). Wali Kota Jambi Maulana: Peluncuran SP2D Online melalui SIPD-RI memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah [Berita]. <https://halojambi.id/index.php/advertorial/54-pemkot/15338-wali-kota-jambi-maulana-peluncuran-sp2d-online-melalui-sipd-ri-memperkuat-kepercayaan-publik-terhadap-pengelolaan-anggaran-daerah>
- Sakti, R. R. A., Afiah, N. N., & Mulyani, S. M. (2023). The Influence of Internal Control and E-Budgeting on the Performance of Local Government Agencies Through the Implementation of Good Governance. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 7(3). <https://doi.org/10.36555/jasa.v7i3.2160>
- Wurara, C. N. C. (2020). George Edwards. *Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kota Manado*, 2(5), 133–138. <https://doi.org/10.4324/9781003080886-10>
- Zakarias, D., Ballu, A., Kabupaten, A., Tengah, S., Nusa, P., Timur, T., Studi, P., Rekayasa, T., & Pemerintahan, I. (2025). *Daerah Di Kabupaten Sumba Tengah*. 1–19.
- Zarnelly. (2019). Sistem Informasi E-budgeting Menggunakan Pendekatan Berorientasi Objek (Studi Kasus: Uin Suska Riau). *Jurnal Ilmiah Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi*, 3(1), 70–77.